

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG REMISI
(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**VIRGI ERNANDA
NPM. 1421020230**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG REMISI
(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REMISI (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)

Istilah remisi di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah pengampunan hukuman (*syafa'at*). Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Pemberian *syafa'at* yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, hal ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Umar dan juga masa pemerintahan Utsman. Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal tersebut tercermin di dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi dalam Pasal 34A? dan Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* tentang kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi bagi narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 khususnya Pasal 34A dan untuk menganalisis pandangan *fiqh siyasah* terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi. Sedangkan, kegunaannya secara teoritis sebagai ilmu pengetahuan para pembaca dan secara praktis untuk memperluas wawasan bagi penulis.

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang berupa Undang-Undang, buku dan literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan data berupa *editing* (pemeriksaan data), *coding* (penanda data), *reconstructing* (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali terhadap orang yang melakukan tindak pidana khusus sekalipun. Di dalam pandangan *fiqh siyasah* Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Virgi Ernanda

NPM : 1421020230

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
REMISI (Studi Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi)**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Agustina Nurhayati, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197408162003122004

Mengetahui

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iiyyah)**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REMISI** (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi) disusun oleh Virgi Ernanda, NPM 1421020230, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/Tanggal: Kamis, 5 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Mundzir, M.Ag.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Henry Iwansyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹ (QS. An-Nisaa’: 58)

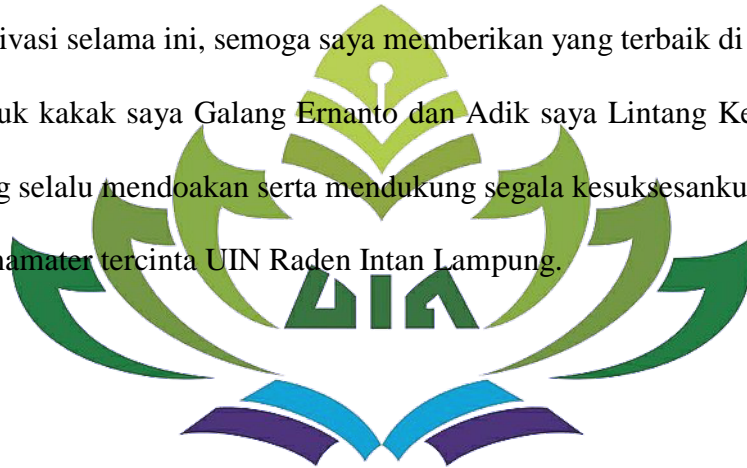


¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 87

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun ke jalan yang penuh barokah. Dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtua saya tercinta yaitu Bapak Suyoto (Alm) dan Ibu Ernawati yang dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidik saya serta selalu memberikan doa dan kasih sayang dan motivasi selama ini, semoga saya memberikan yang terbaik di kemudian hari.
2. Untuk kakak saya Galang Ernanto dan Adik saya Lintang Kesuma Ningrum yang selalu mendoakan serta mendukung segala kesuksesanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Virgi Ernanda, lahir pada tanggal 17 September 1996 di Bandar Lampung.

Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Suyoto (Alm) dan Ibu Ernawati. Beralamat di Jalan Rusa, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu:

1. Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Citra Melati pada Tahun 2001.
2. Penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Gedong Air, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2008.
3. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011.
4. Pendidikan menengah atas di tempuh di SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2011. Selama SMA penulis aktif dalam kegiatan organisasi PASKIBRA.
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, betapa banyak nikmat yang Allah SWT berikan namun hanya sedikit manusia yang mampu mensyukuri. Berkat kemurahan-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REMISI (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)”. Shalawat teriring salam semoga selalu menggema kepada kekasih kita, Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan, pengorbanan dan keberaniannya kita dapat bernafas dalam atmosfer Islam yang penuh kedamaian.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan study pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., beserta staff dan jajarannya.
2. Dr. Alamsyah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap akan kesulitan Mahasiswa.
3. Drs. Susiadi AS, M.Sos.I., selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Frenki, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan Mahasiswa.

4. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Agustina Nurhayati, S.Ag. M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), terutama kelas Siyasah B yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril serta memori dan kebersamaan yang sangat indah dan tidak akan terlupakan selama dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini, semoga kita semua bisa mencapai cita-cita kita.
7. Untuk Anton Kurnia Mardiansyah, S.H., yang selalu sabar mendampingi, membantu, mendoakan, serta memotivasi saya guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan semangat dalam memberikan masukan terkhusus Nita Armita, Nofa Andriyani, Ovilia Harisma P, Fitria Wulandari, Dewi Agustina, Fitri Apriyanti, Faisal Abdaoe, Rendy Yusa Ambara, Alba Roma, Teguh Hermawan, Yan Patmawi, dan Sulthan bin Tahir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan

manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 26 Desember 2018
Penulis,

Virgi Ernanda
NPM. 1421020230



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan Pemerintah di Indonesia	
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	14
2. Model dan Manfaat Kebijakan Publik.....	20
3. Proses Kebijakan Publik.....	21
B. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	25
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	34
3. Sejarah Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah	38
C. Perihal Remisi	
1. Pengertian Remisi.....	42
2. Jenis-Jenis Remisi.....	46
3. Syarat dan Prosedur Pemberian Remisi.....	48
D. Pengurangan Hukuman Dalam Islam	
1. Pengertian Pengurangan Hukuman.....	51
2. Dasar Hukum	53
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN REMISI (PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)	
A. Historitas Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	59
B. Pengaturan Remisi dalam PP Nomor 99 Tahun 2012	60
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi Dalam Pasal 34A.....	65

B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	71
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REMISI (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)”**, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dll) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb).¹ Dalam pengertian lain penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2011, h. 58.

dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²

Kebijakan Pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 adalah tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Dari uraian istilah judul yang dikemukakan diatas maka yang dimaksud judul skripsi adalah suatu kajian mengenai kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang remisi yang akan dianalisis dalam fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

² Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Erlangga: Jakarta, 2008), h. 11.

1. Secara Objektif

Untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A tentang pemberian remisi, serta menjelaskan pandangan fiqh siyasah tentang kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

2. Secara Subyektif

Pembahasan ini diangkat dikarenakan sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas Syariah jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemaksaan pemberlakuannya.

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Kebijakan pejabat administrasi Negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga Negara).

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu Negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukkannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (1997) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen), dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (PerDa).

Kebijakan Pemerintah tentang Remisi tertuang dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2015 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak-hak tertentu yang harus dijamin selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hak tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi. Terkait remisi, syarat pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012. Memberlakukan syarat umum bagi napi pada umumnya, juga menambahkan syarat pemberian remisi bagi kasus narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, sehingga napi tindak pidana tertentu akan lebih sulit untuk mendapatkan remisi

Islam sebagai agama manusia yang datang antara lain bertujuan untuk menegakkan hukum, yang mana akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at islam bukan syari'at yang regional, melainkan syari'at yang universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.³

Syari'at mengkombinasikan hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya, sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan untuk kemaslahatan manusia. Dan karena kondisi masyarakat Indonesia yang

³ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 105.

majemuk sehingga memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan yang serta merta bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakekatnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia suatu masyarakat yang adil, makmur, tertib, dan damai untuk bisa hidup tenteram dan berdampingan bersama masyarakat yang lain.

Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan yang sudah terbukti kesalahannya diantaranya adalah hukuman penjara. Adapun maksud pidana penjara bagi si terpidana, tidak lain supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena disini pidana penjara memberikan penderitaan yang sangat berat baginya. Terhadap narapidana tidak ada penyiksaan berupa tindakan maupun penempatan, ucapan serta cara perlakuan. Satu-satunya derita hanya kehilangan kemerdekaannya saja. Fungsi ini seringkali menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama

didalam lembaga, berupa ketidakseimbangan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.⁴

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan hal yang relatif.⁵

Ada yang berpendapat bahwa pengintegrasian kembali narapidana kedalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama, pengalaman, nilai-nilai, penghargaan dan cita-cita narapidana, termasuk didalamnya latarbelakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat darimana ia berasal. Yang mana seharusnya tugas lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana narapidana ini.

Tentang pengurangan menjalani hukuman (remisi) di Indonesia suatu masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa menjalani hukuman tersebut juga menyangkut hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya kita junjung tinggi. Supaya terciptanya suatu keadilan dan rasa adil merupakan suatu hal yang menjadi suatu tujuan oleh setiap insan sebagai khalifah dimuka bumi.

Masalah pengaturan hukum, bukan saja dilihat dari legitimasinya serta bukan semata-mata dilihat sebagai ekspresi nilai-nilai sosial, melainkan

⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

⁵ *Ibid.*

hukum dimaksud merupakan suatu lembaga yang berkerja untuk dan di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Masalah pidana dan pembinaan terpidana adalah salah satu bidang yang telah mendapat perhatian dalam pembangunan hukum, karena masalah ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. “Remisi adalah kurungan masa menjalani pidana yang

diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Oleh karena itu sistem pemasyarakatan, remisi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini biasanya menyangkut tingkah laku berdasarkan penilaian Tim Pengamat Pemasyarakatan, disamping narapidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan. Dengan adanya persyaratan ini, maka remisi tidak lagi dapat dinamakan anugerah, tetapi merupakan mata rantai di dalam proses pembinaan narapidana.⁷

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi dalam Pasal 34A?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012?

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁶ Peraturan Pemerintah RI, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan* Nomor 32 Tahun 1999, pasal 1 ayat 6.

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: UNPAD, Tahun 1984), hlm. 116.

- a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi bagi narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 khususnya Pasal 34A.
- b. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang pemberian remisi bagi narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Pasal 34A dan *Fiqh Siyasah*.
- b. Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode deskriptif.

Hal ini dimaksudkan agar penulis skripsi sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.⁹

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.¹⁰

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli,¹¹ antara lain mencakup dokumen resmi,

⁸ Drs. Susiadi, M.Sos.I., *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h.10.

⁹ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1996), h. 143.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Sumber data yang penulis gunakan ada dua, yakni :

- a. Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Quran, Hadits, UUD 1945, dan Undang-undang yang berkaitan dengan pemberian remisi misalnya Peraturan Pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.
- b. Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan pendapat para hukum berupa buku, Koran, media “online”, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya.¹² Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

¹² Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara 1995), h. 54.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data yang sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi Pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).¹³

5. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan kedekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif yaitu dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, Op, Cit., h. 126.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pemerintah di Indonesia

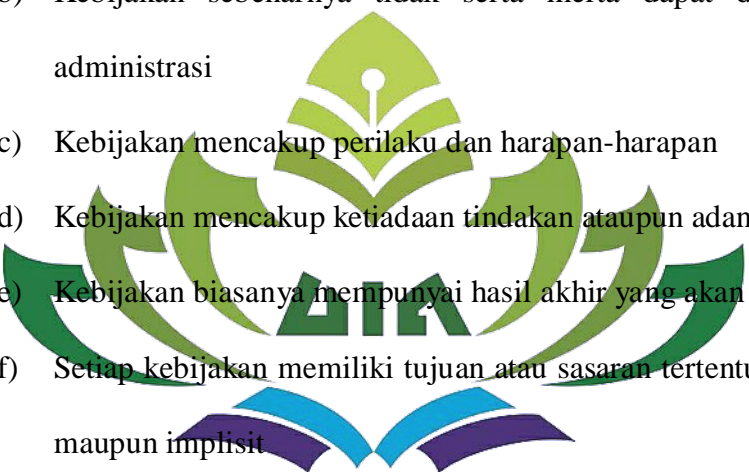
1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹⁴

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:¹⁵

- 
- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
 - b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
 - c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
 - d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
 - e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
 - f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
 - g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
 - h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
 - i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
 - j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

¹⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 40-50.

Menurut Ealau dan Kennetdh Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness om the part of bith those who make it and those who abide it).¹⁶

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta kosenkuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

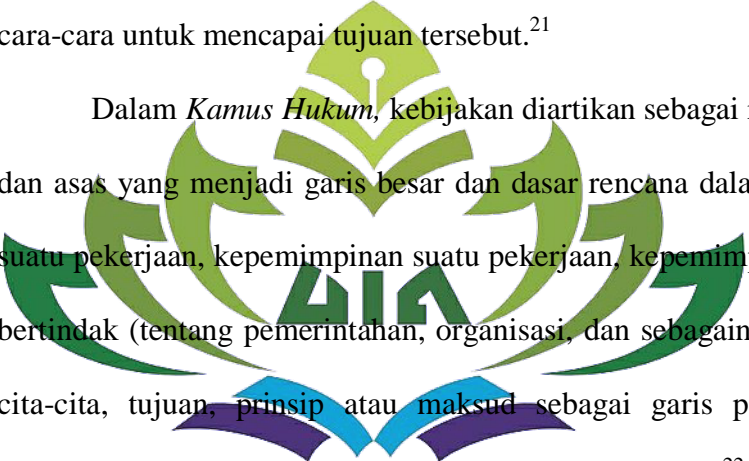
Terminologi kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *bijak* berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah.¹⁷ Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan.¹⁸ Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy*

¹⁶ Charles O. Jones, *Public Policy*

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 184.

yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan).¹⁹

Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.²⁰ Budiardjo dalam buku yang sama berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.²¹



Dalam *Kamus Hukum*, kebijakan diartikan sebagai rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.²²

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut, sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan berbagai sudut tinjauan. Pengertian itu dapat digunakan, baik dari sudut proses, pelaksanaan, produk maupun dari sudut seni. Yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk

¹⁹ Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Edisi II, Cet V, (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 319.

²⁰ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 13.

²¹ *Ibid*, h. 14.

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 57-58.

melaksanakannya. Kebijakan tersebut merupakan aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan public sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu

program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²³ Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.²⁴

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.²⁵

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Irfan Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan

²³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), h. 17.

²⁴ Leo Agustino, *Op.Cit.*, h. 6.

²⁵ Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), h. 2.

keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).²⁶

2. Model dan Manfaat Kebijakan Publik

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang dipilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurai kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan.²⁷ Model adalah isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris, sehingga model seringkali sulit diuji kebenarannya di lapangan. Namun model tetap dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penggalan atau penemuan-penemuan baru. Model menjadi menjadi pedoman untuk menemukan dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial.

Kebijakan publik memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi, dapat membentuk masyarakat hukum, dan dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak masyarakat, mewujudkan

²⁶ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19.

²⁷ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 233.

ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno²⁸ adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah publik ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

²⁸ Budi Winarno, *Op.Cit.*, h. 32.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusi. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi

kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tahap-tahap Kebijakan, Penyusunan kebijakan, Formulasi kebijakan, Adopsi.

Sementara itu dalam pandangan Ripley yang dikutip dalam Subarsono²⁹, tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:

- a. Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai sebuah masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.

²⁹ Subarsono, Ab. 2005. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 19.

- b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
 - c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
3. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
4. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja

dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *Fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam Al Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang suatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.³⁰ Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).

Definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidiin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, h. 15; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 2.

³¹ *Ibid*, h. 2.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³² Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fiqh siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fikih secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³³

Kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab*, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara membawa kemashlahatan.³⁴

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban-ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

³² Ibn Manzhur, *Lisan Al-‘Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968, h. 108.

³³ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafiindo Persada, Jakarta, 1993, h. 21.

³⁴ *Ibid.*

keadaan.”³⁵ Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.”³⁶ Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”³⁷

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama mencari kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT”.³⁸ Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan *syara*’.”³⁹

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: Dat al-Anshar, 1977), h. 4-5.

³⁶ Ma’luf, *al-Munjid*, h. 362.

³⁷ Ibn Manzhur, *Op, Cit.*, h. 362.

³⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar’iyyah*, (Kairo: al-Mu’assasah al-Arabiyyah, 1961), h. 16.

³⁹ Ahmad Fatih Bahansi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari’at al-Islam*, (Mesir: Maktabah Dar al-‘Umdah, 1965), h. 61.

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal dalam perkembangan zaman dan sangat bewrsifat *debatable* (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain: membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴⁰

Apabila digabungkan kedua kata fiqh dan al-siyasi maka fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam Al-Bujairimi, fiqh siyasah adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.⁴¹

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 2-3.

⁴¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babial-Halabi, t.t.), vol.2, h.178.

2. Menurut *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*, atau Lembaga Kementrian, fiqh siyasah adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.⁴²
 3. Menurut Imam Ibn Abidin, fiqh siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para *sultan* (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.⁴³
- Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.⁴⁴ Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, menyatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur

⁴² Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzaratal-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol.25, h. 295.

⁴³ Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), vol.3, h.147.

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 28.

penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.⁴⁵

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.⁴⁶

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik didalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kakayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

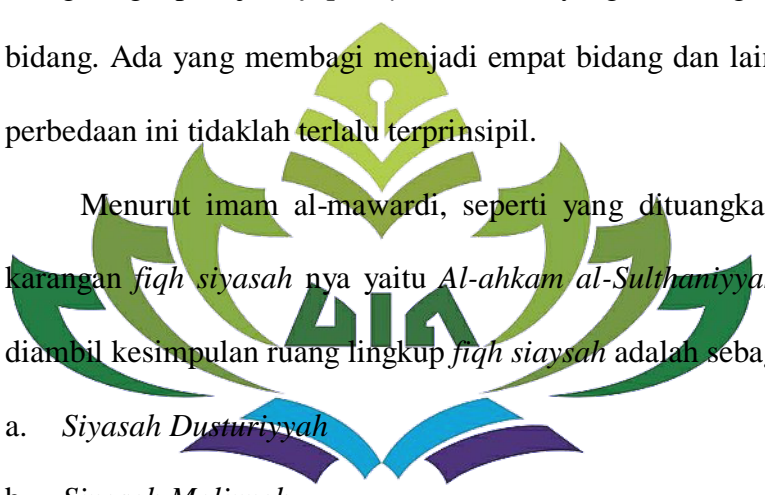
6. ⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), h.

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 28.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengatuaran-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terprinsipil.

Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *fiqh siyasah* nya yaitu *Al-ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siaysah* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 
- a. *Siyasah Dusturiyyah*
 - b. *Siyasah Maliyyah*
 - c. *Siyasah Qadla"iyyah*
 - d. *Siyasah Harbiyyah*
 - e. *Siyasah Iddariyyah*

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemashlahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁷ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006); Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.14.

mereka.⁴⁸ Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:⁴⁹

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa obyek kajian fikih siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap,⁵⁰ dan Hasby membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijakan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasatal-Syar'iyat*, (Dar al-Anshor, Qahirat, 1977), h..5.


⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Madah, r.rp.), h.8.

- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iiyyah* (politik peperangan).⁵¹

Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh siyasah dibagi menjadi empat bagian yakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyah*
- c. *Siyasah Dauliyah*
- d. *Siyasah Harbiyah*



Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti Siyasah dapat kita lihat dipembahasan diatas, sedangkan Dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum siyasah Dusturiyyah adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemashlahatan umat. Sedangkan menurut Pulungan Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti Siyasah Dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga Negara dengan kepala negaranya.

⁵¹ *Ibid.*

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga Negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al siyasah al-duali al khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dan Negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-

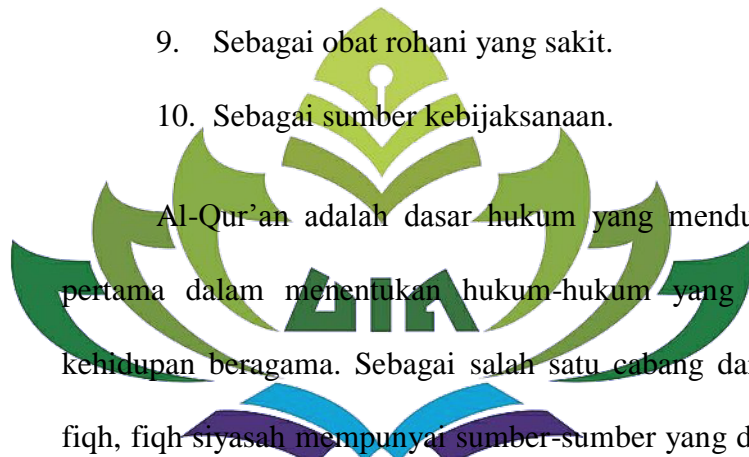
hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan emmelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarlauskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepda umat manusia⁵², antara lain:

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
2. Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah SWT dalam bentuk kasih sayangNya.
3. Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dengan yang terlarang dilakukan.
4. Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.

⁵² Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 334.

6. Sebagai yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
7. Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai obat rohani yang sakit.
10. Sebagai sumber kebijaksanaan.



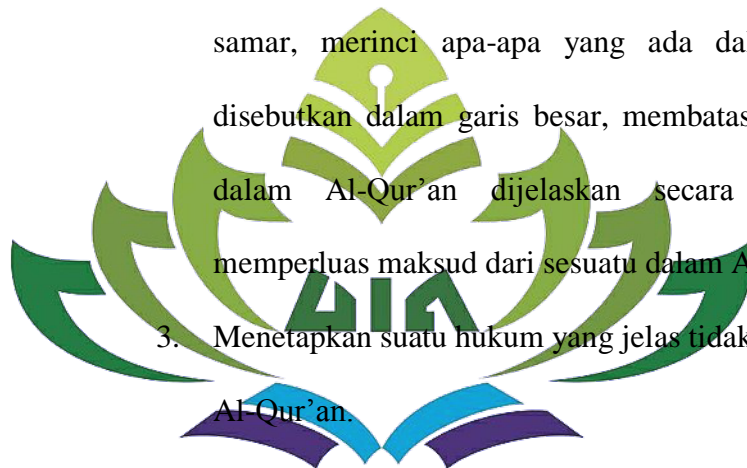
Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fiqh siyasah.

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-'Arab (mengutip pendapat Syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan

berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanya.⁵³ Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi Hadist adalah:

1. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.



Al-Hadist merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

c. Hukum Siyasah Menurut Ulama' Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siyasah. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara'. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan ibn

⁵³ M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 13-14.

al-Qayyim “*Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara.*”⁵⁴

Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan atau prinsip itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.⁵⁵

Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan siyasah syar’iyyah sesuai dengan syara’, berarti harus sesuai dengan manthuq-nya syara’.

Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan keduanya, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar’iyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara’ secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar’iyyah sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara’ secara mafhum.

3. Sejarah Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqh Siyasah

Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian

⁵⁴ H. A. Djazuli, *Op.Cit.*, h. 9.

⁵⁵ M. Soleh Bajuri, “*Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam*”. Jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 (Medan: Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, Juli 2012), h. 461, (On-line), tersedia di: <http://www.ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (11 Februari 2019).

pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.

Pada pemerintahan Umar yang dimana mengenai hukum potong tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik. Karena maksud hanya untuk menghindari diri dari kematian atau menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya. Mengenai masalah ini para ulama fiqih sepakat bahwa tidak dipotong tangan pencuri pada masa paceklik, karena dalam situasi ini darurat maka membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada saat itu hukum Islam tentang potong tangan untuk yang melakukan pencurian sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum *hudud* itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.⁵⁶

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu. Pada masa ini Umar tidak

⁵⁶ Desbayy, "Makalah Syariqoh (Pencurian)" (On-Line), tersedia di: <http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, (17 Januari 2019).

menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam ushul fiqh dengan *Al illat An Naqishab*.⁵⁷

Dalam riwayat tersebut dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subjek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana disebutkan fiqh Umar. Siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan menanggukuhkan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan dibolehkan yang terlarang karena darurat. Hal ini disebutkan pula di dalam Al-Qur'an:



Artinya: “tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah: 173)⁵⁸

Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al-Khattab ada dua yang bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh kedalam kebinasaan dengan tidak diperolehkannya makan. Kedua menjaga harta orang lain dari teraniaya. Keduanya wajib dipelihara, karena kedua-duanya termasuk aspek *dharuriyat* (primer).⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, (17 Januari 2019).

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984), h. 26.

⁵⁹ Desbayy, *Op. Cit*, (17 Januari 2019).

Sarah, Budak wanita Ikrimah bin Abu Jahal, ia sering menghina Rasulullah SAW. Maka, ia dijatuhi hukuman mati. Namun, ia dibebaskan setelah ia memohon dan meminta perlindungan pada Rasulullah SAW. Ia kemudian masuk Islam dan hidup hingga masa Khalifah Umar.⁶⁰

Pada masa kapemimpinan Ustman pemberian pengampunan juga pernah diberikan oleh Ustman. Bahwa pada masa pemerintahannya Ustman menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan juga makmur. Dalam riwayat yang sahih dinyatakan bahwa pada masa pemerintahan Ustman juga tidak ada gangguan keamanan dari pihak musuh, kekayaan melimpah, hubungan antar masyarakat harmonis, mereka diliputi perasaan cinta, persaudaraan, dan persatuan serta tidak ada rasa ketakutan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain diberbagai penjuru negara Islam.

Indikasi lainnya ialah bahwa pintu rumah Ustman senantiasa terbuka bagi rakyat, sehingga dia menerima para rakyat dan mendengarkan keluh kesah yang sedang dirasakan oleh para rakyatnya. Ketika segolongan orang mengadukan gubernurnya yang bertugas di provinsi Kufah yang tidak lain bernama Al-Walid bin Uqbah yang tidak lain ialah kerabat dari keluarga Utsman, bahwa segerombolan orang tersebut berkata bahwa mereka meenyaksikannya sendiri bahwa gubernur Kufah pada saat itu sedang meminum khamer. Lalu Utsman pun memberhentikan gubernur Kufah yang telah meminum khamer dari

⁶⁰ Aditya Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Koruptor" (*Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang*, 2012), h. 34.

masa jabatannya karena telah melanggar aturan dan Utsman juga hanya memberikan jatuhnya hukuman yaitu hukuman berupa pengasingan dari tempat tinggalnya dan pencopotan dari masa jabatannya.⁶¹

C. Perihal Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitif*, juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.⁶²

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁶³

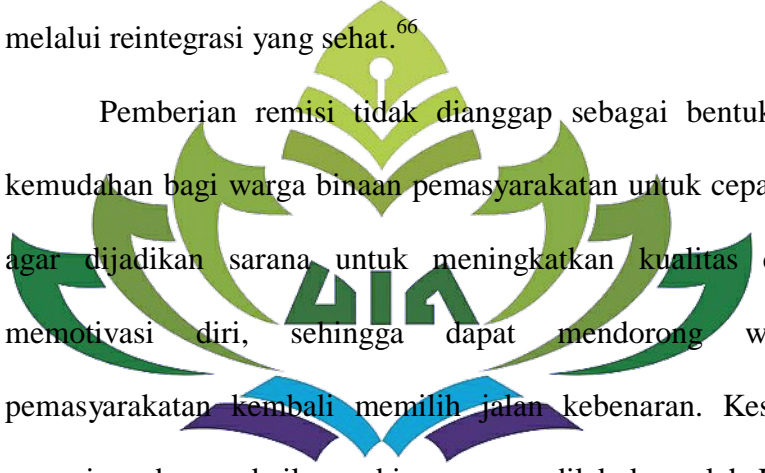
Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang

⁶¹ Khalid Kabir Allal, *Kemelut Dimasa Utsman Diterjemahkan oleh Abdulrrhim*, (Solo: Zam-sam, 2015), h. 81.

⁶² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama. hal.106.

⁶³ *Ibid*, hal.133.

bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁶⁵ Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.⁶⁶



Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dimasa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan

⁶⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang *Remisi*.

⁶⁵ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (6).

⁶⁶ Dwidja Priyatno, *Op.Cit.* h.143.

kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.⁶⁷ Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.⁶⁸

Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat dimana warga binaan pemasyarakatan kembali.⁶⁹

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan dimasyarakat.

⁶⁷ Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

Bagi narapidana kebanyakan, hak remisi merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan dikalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai disamping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan Remisi Tambahan salah satu syaratnya adalah “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas”. Untuk syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi tambahan, agar tidak menimbulkan kecemburuan dikalangan narapidana dan kecurigaan masyarakat, perlu adanya optimalisasi lembaga pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan setempat yang juga melibatkan Hakim Wasmat dengan menitik beratkan


pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

1) Remisi Umum

Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan



Masa jalan (Tahun)	Pemotongan remisi (bulan)
0,5-1	1
1	2
2	3
3	4
4	5
Untuk tahun kelima dan seterusnya tetap mendapatkan 6 bulan.	

2) Remisi Khusus

Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam

setahun maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Masa jalan (tahun)	Pemotongan remisi (hari)
0,5-1	15
1	15
2	30
3	30
4	45
Untuk tahun kelima dan seterusnya tetap mendapatkan 60 hari.	

3) Remisi Tambahan

Merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- Berbuat jasa kepada Negara.
- Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika napi telah berjasa dan bermanfaat bagi bangsa dan negara akan diberikan tambahan sebesar $\frac{1}{3}$ dari remisi umum.

4) Remisi Dasawarsa

Merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidana bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali. Remisi dasawarsa akan diberi sebesar $\frac{1}{12}$ dari masa vonis pidana dengan maksimal pengurangan 3 bulan.

5) Remisi Khusus Yang Tertunda

Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi ini adalah untuk meringankan masa pidana atau hukuman bagi narapidana yang dalam kurun waktu 6 (enam) bulan telah menunjukkan perbuatan baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai narapidana belum diperolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses peradilan sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi narapidana yang bersangkutan juga terlambat dan pengajuan remisi bagi dirinya juga terlambat yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar narapidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang sama sebagaimana narapidana yang lainnya.

6) Remisi Khusus Bersyarat

Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya berlangsung namun masa pidana yang telah dijalannya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata narapidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukkan ke dalam register F.

3. Syarat dan Prosedur Pemberian Remisi

Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat

dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁰

Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratif:⁷¹

- 1) Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 2) Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
- 3) Surat Penahanan dari Kepolisian,
- 4) Kartu pembinaan,
- 5) Daftar perubahan ekspirasi
- 6) Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat di batalkan.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Narapidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang :⁷²

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;

⁷⁰ *Op.Cit*, Pasal 34 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

⁷¹ Merupakan salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

⁷² Berdasarkan Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf-b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- b. Dikenakan hukuman disiplin dan di daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan dari Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

D. Pengurangan Hukuman dalam Islam

1. Pengertian Pengurangan Hukuman

Istilah remisi di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah pengampunan hukuman (*syafa'at*). Dalam syari'at Islam terdapat suatu aturan yang cukup penting, berkaitan masalah pengurangan hukuman. Kemudian arti itu berkembang lagi menjadi “Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain.”⁷³

Syafa'at yang sangat tepat diterapkan dalam lapangan kepidanaan Islam, yaitu yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya *Al-Ta'rifat*, yaitu:

“Suatu permintaan dari seorang makhluk yang pernah melakukan suatu kejahatan, supaya dibebaskan dari segala dosa yang pernah dilakukannya”⁷⁴

Secara terminologi *syafa'at* adalah meminta bantuan kepada orang lain. Jika apa yang diharapkan seseorang terdapat pada pihak lain. Yang ditakuti atau disegani, maka ia dapat menuju kepadanya dengan mengedepankan dirinya dengan orang lain menghadap yang dituju itu untuk bersama-sama memohon yang ditakuti dan disegani itu. Orang

⁷³ Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007), h. 306.

⁷⁴ Ali Ibn Muhammad, al-Jurjani, *Al-Tarif*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405 H), cet. Ke-I, h. 142.

yang dituju itulah yang mengaju permohonan. Dia menjadi penghubung untuk meraih apa yang diharapkan itu.

Syafa'at juga berarti sebagai doa, memohon dihapuskan dosa dan kesalahan seseorang. *Syafa'at* Nabi pada hakikatnya adalah doa dan munajat beliau pada Allah SWT, karena kedekatan dan kedudukan beliau yang mulia di sisi Allah. Maka Tuhan akan mengabulkan doa tersebut dan meliputi kasih sayang-Nya kepada orang yang telah berbuat dosa, serta mengampuninya. Pada hakikatnya, *syafa'at* terlahir karena kemuliaan dan kelembutan Allah SWT memberikan izin kepada segenap makhluk yang shaleh, dari malaikat, para rasul, dan orang-orang mukmin, untuk memberi pertolongan pada hari kiamat terhadap orang-orang mukmin yang melakukan maksiat.⁷⁵

Bila dikontekskan pada masa sekarang pengurangan hukuman sering kali disebut dengan kata remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan pada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman.

Berkelakuan baik itu merupakan interpretasi orang yang bertaubat karena orang yang bertaubat adalah orang yang menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah, sehingga ia bertaubat dan melakukan perbaikan atas perilakunya.

Ada tiga macam *Syafa'at*, yaitu:

⁷⁵ Bisri M. Jaelani, *Op. Cit.*, h. 308.

Pertama, *syafa'at Takwiniyah*, berkaitan dengan kesaksian ilmiah filosofis tentang adanya sistem alam semesta yang ditegakkan atas dasar silsilah sebab akibat (Kausalitas), tidak berdiri sendiri pada dzatnya, tidak berdiri sendiri dalam illat (sebab) dan pengaruh yang dimilikinya.

Kedua, *syafa'at Qiyadiyyah*, (syafa'at berupa bimbingan), syafaat ini berupa kepemimpinan para nabi, para wali, para imam dan kitab suci yang berfungsi sebagai syafa'at untuk mencegah manusia masuk kedalam kemaksiatan dan azabnya.

Ketiga, *syafa'at Mustihalahah*, adalah sampainya rahmat dan magfiroh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Magfiroh dan ampunan bisa diperoleh melalui jalan dan sebab-sebab.⁷⁶

2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum tentang adanya konsep *al-'afwu* atau *al-syafa'at* dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Al-Baqarah (2) ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa

⁷⁶ Ibid., h. 310.

*yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.*⁷⁷

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qisash* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.⁷⁸

2) Surat An-Nisaa' (4) ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁷⁹

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 27.

⁷⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 260.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 85.

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan *syafa'at* tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Dengan kata lain memberikan *syafa'at* dalam surat An-Nisaa' ayat 85, bertujuan supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja *syafa'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upaya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi *syafa'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul

bagian dosa dari usahanya. Allah SWT. sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.⁸⁰

3) Surat Asy-Syura (42) ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”.⁸¹

Dalam surat ini menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan harus ada baalasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci orang-orang yang selalu melakukan kezaliman. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu.

Akan tetapi pemberian remisi yang dikemukakan oleh menteri kahakiman dan menteri hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang bisa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat. Allah sendiri menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. 1, h. 511.

⁸¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 487.

4) Surat Al-A'raf (7) ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan didalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (perkara kebaikan), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka)”.⁸²

5) Surat An-Nisaa' (4) ayat 17

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ
مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿١٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁸³

Maksudnya ialah: 1. orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 2. orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3. orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Meskipun seperti itu kalau mereka mau menyadari dan melakukan hal yang terbaik

⁸² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 176.

⁸³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 80.

setelah melakukan itu Allah pasti akan memutuskan hal yang terbaik pula bagi mereka karena Allah Maha Bijaksana.



BAB III

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN REMISI (PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi)

A. Historitas Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, mengatakan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertujuan untuk mengakomodir keinginan publik yang kesal dengan hukuman kepada koruptor pada negeri ini. PP itu berisi pengetatan pemberian remisi bagi terpidana kasus pidana khusus.

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum, menghambat perkembangan demokrasi yang sebenarnya tak patut untuk mendapatkan remisi jika dilihat dari sudut pandang kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa meskipun remisi tersebut merupakan hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, pengetatan pemberian remisi ini merupakan langkah konkret agar narapidana khusus tidak serta merta mudah untuk mendapatkan remisi.⁸⁴

Syarat dan tata cara pemberian remisi pada awalnya diatur dalam PP RI No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, akan tetapi untuk menyesuaikan perkembangan hukum di Indonesia dan rasa keadilan bagi masyarakat PP tersebut mengalami dua kali perubahan, yaitu :

⁸⁴ Romli Atmasasmita, "*Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, h. 9.

Pertama diubah menjadi PP RI No 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat dan tata caranya itu diperketat bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Kedua diubah menjadi PP RI No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP RI No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, itu lebih diperketat lagi karena ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini.

B. Pengaturan Remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Pengaturan remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur tentang:

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk

membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
 - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kebijakan Pemerintah Yang Tertuang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi Dalam Pasal 34A

Persoalan yang menyangkut *equality before the law* di Indonesia kerap menjadi persoalan dalam berbagai dimensi, misalnya dalam konteks pemberian remisi, persoalan yang muncul semata-mata bukan sekedar pemenuhan HAM terhadap narapidana melainkan berkaitan dengan kesesuaian nilai keadilan dalam masyarakat.

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman didalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan goncangan. “Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan”.

Peraturan pelaksana terhadap hak asasi manusia di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. “Salah satu bentuk hak-hak asasi yang diberikan Negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga

merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya.

Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal tersebut tercermin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Negara Indonesia tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali terhadap orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa sekalipun.

Aspek sosiologis pemberian remisi kepada narapidana hanya akan menimbulkan gejolak baru yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Kehadiran secara yuridis telah diakui, namun para pembuat Undang-Undang harus benar-benar mempertimbangkan aspek sosiologis yang memihak masyarakat umum, dan juga telah sesuai dengan kemauan masyarakat dan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua masyarakat dalam memaknai pemberian remisi kepada Narapidana.

Remisi secara spesifik tidak ditemukan dalam ketentuan hukum berupa Undang-Undang di Indonesia sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun praktik remisi telah menjadi bagian dari praktik dijalankan oleh pemerintah yang kemudian

menjadi hal yang bersifat normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana narapidana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. “Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapas terhadap para narapidana, untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi”

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (lapas), yang diatur dalam Kepres No 69 tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Pada pasal 34 PP No 28 Tahun 2006, menentukan yang menjadi syarat dalam memperoleh remisi antara lain :

1. Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
3. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lepas.

Kebijakan pengetatan remisi itu substansinya bukan menanggukkan atau menghapuskan sama sekali pemberian remisi, tapi tetap memberikan remisi terhadap narapidana kejahatan luar biasa dengan persyaratan yang di perketat, karena pemberian remisi terhadap narapidana kejahatan luar biasa selama ini sangat mudah dan sudah seperti diobral.

pemberian remisi kepada narapidana khusus adalah hak segala narapidana yang di atur dalam Undang-Undang RI No12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Melihat UU tersebut dan yang didukung oleh Kepres bahwa narapidana kejahatan luar biasa juga berhak mendapatkan remisi tetapi dengan syarat tambahan yang di atur didalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dalam rangka mewujudkan pengetatan dalam memberikan remisi terkhususnya kepada narapidana kejahatan luar biasa yang syarat-syarat nya tercantum pada pasal 34A Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 sebagai berikut :

Pasal 34A :

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh

lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) Kesetian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, presekutor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Kesiapan untuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Remisi diberikan oleh menteri yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri. Untuk remisi dalam tindakan pidana tertentu diatas, harus telah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait yaitu dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya pertimbangan dari menteri. Menteri terkait adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan. Sedangkan pimpinan lembaga terkait antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penggulangan Terorisme.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Kebijakan Pemerintah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an il'amin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum Islam disebut *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Di dalam firman Allah surat An-Nisaa' ayat 58-59 dijelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisaa’: 58)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa’: 59)⁸⁵

Dimana kedua ayat tersebut adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An-Nisaa’: 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (An-Nisaa’: 59).⁸⁶

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 87.

⁸⁶ Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Allislâm wa Taqniinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), h. 102.

dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan pemberian *Syafa'at* yang dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW yang mengindikasikan sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: "Sarah, Budak wanita Ikrimah bin Abu Jahal, ia sering menghina Rasulullah SAW maka ia dijatuhi hukuman mati. Namun, ia dibebaskan setelah ia memohon dan meminta perlindungan pada Rasulullah SAW. ia kemudian masuk Islam dan hidup hingga masa Khalifah Umar. Dalam kesempatan lain Khalifah Umar juga pernah membebaskan pencuri dari hukuman potong tangan dengan alasan pada waktu itu tengah terjadi musim paceklik (kelaparan), sehingga memaksa orang itu sehingga melakukan pencurian."

Pada bagian ini analisis tentang pandangan fiqh siyasah terhadap pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus yang didukung oleh dasar hukum Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Remisi, dalam pandangan fiqh siyasah pemberian remisi dapat diberikan kepada narapidana tindak pidana khusus karena remisi hak segala narapidana yang di atur dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Melihat UU tersebut dan yang didukung oleh Kepres bahwa narapidana

korupsi juga berhak mendapatkan remisi tetapi dengan syarat tambahan yang di atur didalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.

Berarti memberikan remisi kepada narapidana tindak pidana khusus harus sesuai dengan dasar-dasar hukum tersebut agar tidak mencederai keadilan masyarakat karena tindak pidana khusus memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian Negara. Dalam siyasah dikenal dengan siyasah syar'iyah kebijakan seorang penguasa yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat bukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi, pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus tidak masalah jika sesuai dengan aturan dan HAM.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemberian remisi bagi narapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungi rakyatnya. Oleh karena itu dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM, pemerintah bertugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Hal tersebut tercermin di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Negara Indonesia tetap konsisten dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali terhadap orang yang melakukan tindak pidana khusus sekalipun. Namun dalam pemberian remisi ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh narapidana yang tertuang di dalam Pasal 34 PP No 28 Tahun 2006. Dan dalam rangka mewujudkan pengetatan dalam memberikan remisi terkhususnya kepada narapidana tindak pidana khusus yang syarat-syarat nya tercantum pada pasal 34A Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012.
2. Di dalam pandangan fiqih siyasah berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari

kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Dalam siyasah dikenal dengan siyasah syar'iyah kebijakan seorang penguasa yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat bukan berdasarkan hawa nafsu. Menurut penulis pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus tidak masalah jika sesuai dengan aturan dan HAM. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

B. Saran

1. Saran dari penulis, pemerintah perlu merumuskan suatu peraturan pemerintah perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum, mulai dari pola pembinaan sikap, dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus.
2. Pemerintah perlu mengkaji ulang penetapan pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus dan pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penerapan PP No. 99 Tahun 2012 khususnya pada pelaku tindak pidana korupsi dalam membongkar kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dat al-Anshar, 1977.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*, Riyadh: Jamiah Riyadh, 177.
- Aditya Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Koruptor" (*Skripsi* Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2012).
- Ahmad Fatih Bahansi, *Al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari'at al-Islam*, Mesir: Maktabah Dar al-'Umdah, 1965.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006.
- Ali Ibn Muhammad, al-Jurjani, *Al-Tarifat*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1405H.
- Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*.
- Arya Sosman, "Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Tipikor" <http://blogspot.co.id>, (23 Desember 2018)
- Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Desbayy, “Makalah Syariqoh (Pencurian)” (On-Line), tersedia di: <http://desbayy.blogspot.co.id/2015/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, r.rp.

Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003.

Husain Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987.

Ibn Manzhur, *Lisan Al-‘Arab*, Juz 6, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: al-Mu’assasah al-Arabiyyah, 1961.

Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Keebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Khalid Kabir Allal, *Kemelut Dimasa Utsman Diterjemahkan oleh Abdulrrhim*, (Solo: Zam-sam, 2015).

Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

M. Soleh Bajuri, “Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif dan Pengembangan Studi Hukum Islam”. Jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 (Medan: Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, Juli 2012), h. 461, (On-line), tersedia di: <http://www.ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, (11 Februari 2019).

M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.

Menteri Hukum dan HAM, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamsi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *FIqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Erlangga: Jakarta, 2008.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: UNPAD, Tahun 1984

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.

Nafi Harahap, "Remisi dan pembebasan Bersyarat," <http://blogspot.co.id>, (23 Desember 2018)

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, Edisi II, Cet V, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor: 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Romli Atmasasmita, "Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, h. 9.

Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Raja Grafiindo Persada, 1993.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Subarsono, Ab, "Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi'', Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj*, Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.

Susiadi AS, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Winarno Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1996

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco, 1971.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.

